



formal PPP telah menjadi partai terbuka bagi siapa saja, termasuk terbuka untuk menerima golongan diluar Islam. Ini berarti pula, dimulainya babak baru untuk memulai aktifitas politik tanpa label Islam, sekaligus menandai babak terakhir dari sejarah partai politik Islam yang telah dirintis sejak 1912 dengan munculnya Syarikat Dagang Islam (SDI)

Salah satu pertanyaan mendasar yang menyangkut hubungan antara Islam dan politik adalah mungkinkah aspirasi politik Islam dapat disalurkan tanpa melalui partai Islam ? Bagi Umat Islam, persoalan penerimaan asas tidak hanya berhenti sampai disitu. Salah satu masalah besar adalah follow-upnya, artinya dengan tiadanya parpol Islam saat ini melalui saluran atau wadah politik mana aspirasi politik Islam itu diartikulasikan ? Dapatkah atau bersediakah ketiga orpol yang ada menjadikan Islam sebagai salah satunya tolok ukur segenap proses pengambilan keputusan politik ? Disinilah aspirasi Islam tidak bisa dilepaskan dari arti keberadaannya ditengah-tengah masyarakat yang sedang mengalami transformasi diberbagai segi kehidupan. Pengambil kebijakan, dalam hal ini pemerintah dapat meneruskan strategi tiga partai tanpa partai berlabel Islam, tetapi dengan mengembangkan iklim politik yang





Islam. Arah Islam kepada negara Islam memberikan dukungan positif terhadap berbagai kebijakan.

Perjuangan umat Islam lebih merupakan gerakan etik dari pada gerakan politik yang melakukan pressure terhadap kekuasaan. PPP yang berfungsi seperti ini pada era 70-an, setelah dekade 80-an tidak mampu lagi menciptakan citra sebagai wadah penyalur aspirasi politik umat Islam. Selain karena faktor-faktor internal dalam dirinya, juga karena desakan-desakan eksternal yang sulit dihindari.

Ada anggapan yang relatif sama di kalangan umat Islam bahwa hubungan akomodatif pada saat ini adalah sebuah kondisi yang dibutuhkan untuk mencapai target-target politik di masa depan. Pada kenyataannya reaktualisanya memiliki nuansa-nuansa yang berbeda satu sama lain. Munculnya ICMI era 90-an yang menjadi wadah Cendekiawan Muslim, pada tingkat negara berusaha mempengaruhi proses pengambilan politik, baik dalam hal keputusan politik yang berkaitan erat dengan rekrutmen elite --seperti banyaknya menteri Islam dikabinet-- maupun produk-produk kebijakan negara. Begitu juga dengan Muhammadiyah yang menjalankan politik alokatif dengan instrumen lobyng, termasuk mengadakan bargaining dengan Presiden Soeharto, sementara NU sebagai lembaga



taktis-politis pada saat memerlukan dukungan umat Islam.

Dalam hal ini, yang mampu untuk mewedahi sekaligus menjadi corong aspirasi umat Islam adalah Golkar, sebab dengan kebesarannya sekaligus sebagai "Single Majority" Golkar dapat berkehendak lebih banyak.

Golongan Karya memang bukan partai agama, akan tetapi melihat apa yang dilakukan selama ini terasa jauh berbeda. Nuansa-nuansa Islam kian nampak di dalamnya. seperti dalam lembaga tinggi negara, MPR, Golkar pun memiliki wakil-wakil golongan ulama dan cendikiawan muslim. Dengan demikian, Golkar telah benar-benar sarana untuk mempertautkan negara dengan Islam atau setidaknya personel-personel tersebut akan memperjuangkan aspirasi Islam.

Seperti kedekatan Abdurrahman Wahid dengan Mbak Tutut, misalnya, atas nama NU dalam kedudukannya sebagai anggota fraksi Karya Pembangunan memperjuangkan masuknya pesanteren dalam GBHN. Kenyataan seperti ini tentu tidak sejalan dengan pemikiran umat. Disatu pihak mereka berkoar-koar mencari saluran untuk menyalurkan politik mereka melalui kekuatan politik manapun --karena tiadanya partai Islam-- namun disisi lain mereka bisa memahami kehadiran tokoh Islam dalam wadah politik yang tidak memiliki hubungan historis dengan partai-partai



Islam. Sehingga tidak jarang mereka mengutuk, mencela eksponen dari kalangan mereka sendiri yang terjun di dalam lembaga politik Golkar lebih-lebih PDI.

Kedatipun Islamisasi Islam Golkar adalah satu hal yang absurd, tetapi patut di pertanyakan jika umat Islam tetapi tidak arif dalam membaca perkembangan politik, tidak realistis dalam melihat konstelasi politik yang makin terbuka terhadap berbagai pengaruh yang ditawarkan oleh kelompok-kelompok lainnya. Tidak jujur mengakui potensi diri di tengah-tengah persaingan dengan pihak lain serata tidak pula memperkaya nuansa dalam apresiasi situasi yang tidak pernah kebal dari kemungkinan pergeseran.

Sebaliknya terlalu berserah diri pada PPP juga bukan pilihan terbaik, begitu juga terhadap PDI. Karena itu yang paling urgen sebenarnya adalah kembali memahami arti keberadaan asas tunggal, dengan demikian yang dituntut bagi umat Islam adalah ketegasan arti penerimaan dasar negara tersebut untuk menjadikan negara sebagai lahan pengabdian kepada Allah dalam menghadapi realitas kehidupan.

Dalam situasi sekarang tampaknya umat Islam harus melihat Golkar sebagai realitas politis yang masih dalam proses dan akan selalu dinamis. Sebagaimana yang telah

